

**PROGRAM PASCA SARJANA MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**SILABUS**

**Mata Kuliah : Perencanaan dan Penganggaran Publik**

**Dosen : Wahyudi Kumorotomo (Prof.Dr.MPP.), Suropto (Dr. MPA)**

**LATAR BELAKANG**

Di sebagian program S1 administrasi negara, administrasi publik atau manajemen dan kebijakan publik, kuliah penganggaran publik sudah diperoleh. Namun sebagian yang lain yang mengikuti kuliah ini di jenjang S2 belum pernah mendapatkan mata-kuliah ini. Secara umum, mata-kuliah ini dimaksudkan untuk memberikan bekal teori, analisis, maupun keterampilan teknis yang berkaitan dengan kebijakan fiskal dan penganggaran publik di Indonesia. Mahasiswa mestinya sudah mendapatkan kuliah Kebijakan Publik, Ekonomi Sektor Publik atau mata kuliah pilihan lain seperti Isu dan Kebijakan Desentralisasi, yang kesemuanya akan relevan dengan mata kuliah ini. Untuk itu referensi pada kuliah-kuliah tersebut menjadi dasar yang penting dalam mengikuti mata kuliah Penganggaran Publik.

Untuk konteks di Indonesia, pembahasan mengenai anggaran publik masih diwarnai oleh kenyataan bahwa proses perumusan anggaran bersifat sangat politis, harus mengikuti kebijakan desentralisasi yang menjadi ciri dari proses demokratisasi, dan relatif kecilnya kontribusi anggaran publik terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Kebijakan anggaran publik bukan lagi menjadi monopoli dari pemerintah, tetapi juga harus melibatkan unsur legislatif serta unsur-unsur kekuatan politik lainnya. Sementara itu, seiring dengan kebijakan desentralisasi, format kebijakan anggaran pada tingkat pusat dan daerah kini mengalami perubahan sehingga menuntut pemahaman mengenai isu politik maupun ekonomi yang makin kompleks. Selanjutnya, tujuan dari kebijakan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat harus dapat dicapai sesuai dengan tuntutan sistem administrasi publik yang modern dan responsif.

Agar kuliah dapat berjalan secara inter-aktif, para mahasiswa diharapkan aktif mencari sumber referensi secara mandiri. Selain sumber-sumber referensi yang sudah terdapat di dalam silabus, para karyasiswa diharapkan menggali sumber-sumber informasi yang lain, baik melalui Internet, kumpulan artikel, serta tulisan-tulisan aktual yang mungkin diangkat sebagai kasus dalam diskusi di kelas.

**SISTEM EVALUASI**

Evaluasi terhadap karyasiswa peserta kuliah ini didasarkan pada tiga kriteria pokok, yaitu:

1. Partisipasi di dalam diskusi kelas
2. Pembuatan kertas-kerja atau tugas individual
3. Ujian semester.

## RENCANA KULIAH

No.	Topik Perkuliahan	Bacaan Utama
1.	<p><b>Pengantar Kuliah</b>                      Dalam sesi awal ini, kuliah menjelaskan silabus dan beberapa kesepakatan tentang sistem perkuliahan serta pendekatan yang akan dipakai di dalam membahas kebijakan fiskal pada tingkat nasional maupun daerah.</p>	<p>Silabus</p>
2.	<p><b>Pendekatan dalam penganggaran publik: politik, ekonomi, administrasi</b>                      Membahas fungsi kebijakan fiskal dan anggaran publik dari perspektif yang berbeda-beda.</p>	<p>Tanzi, <i>Public Finance in Developing Countries</i> (1991)                      Musgrave, <i>Public Finance</i> (1964)                      Anderson, <i>Politics and the Economy</i> (1966)                      Manor, <i>The Political Economy of Democratic Decentralisation</i> (1999)                      Peters, <i>Public Policy: Promise and Performance</i> (1966)</p>
3.	<p><b>Paradigma penganggaran publik: Line-item budgeting, PPBS (Planning, Programming and Budgeting Systems), Zero-Based Budgeting, Performance-Based Budgeting</b>                      Perkembangan berbagai paradigma dalam penganggaran publik dibahas dalam sesi ini. Juga dijelaskan mengenai konsekuensi dari penggunaan masing-masing paradigma dan praktiknya di Indonesia</p>	<p>Breul, J. D. &amp; Moravits, C. eds. <i>Integrating Performance and Budgets</i> (2007).                      Rubin, <i>New Directions in Budget History</i> (1988).                      Kelly, J.M. &amp; Rivenbark, W.C. (2011). <i>Performance Budgeting for State and Local Government</i>. New York: M.E. Sharpe.</p>
4.	<p><b>Siklus anggaran</b>                      Sesi ini menguraikan tentang siklus anggaran publik di Indonesia. Namun berbeda dengan pendekatan yang biasa dianut, setiap tahapan dalam siklus anggaran pemerintah pusat atau daerah dipahami sebagai titik pembuatan kebijakan politik.</p>	<p>Banfield, <i>Political Influence</i> (1961)                      Bahl &amp; Linn, <i>Urban Public Finance in Developing Countries</i> (1992)</p>
5.	<p><b>Politik anggaran, desentralisasi dan hubungan antar lembaga</b>                      Membahas tentang aspek politik dari penganggaran, kebijakan desentralisasi fiskal, seperti yang tertuang dalam UU No.33/2004, No.23/2014, UU No. 17/2003 beserta permasalahan yang</p>	<p>Rubin, <i>The Politics of Public Budgeting</i> (2000)                      Cheema &amp; Rondinelli, <i>Decentralisation and Development</i> (1983)                      Bird &amp; Vaillancourt, <i>Fiscal Decentralisation in Developing</i></p>

	<p>timbul dari kebijakan tersebut. Juga menguraikan tentang keterkaitan lembaga pemerintah di dalam sistem anggaran dan kebijakan fiskal yang berlaku. Di tingkat pusat, ini akan menyangkut DPR, lembaga kepresidenan, BPK, Bappenas, Departemen Keuangan, serta departemen teknis lainnya. Di tingkat daerah, ini akan menyangkut DPRD, kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota), Biro/Bagian Keuangan, Bappeda, BKP, Bawasda, dan sebagainya.</p>	<p>Countries (1998) Breton, An Introduction to Decentralisation Failure (2000) Chandler, Public Policy-Making for Local Government (1988) MacAndrews, Central Government and Local Development in Indonesia (1986)</p>
6.	<p><b>Manajemen penerimaan (revenue assignments)</b> Membahas sisi penerimaan dari anggaran pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Pembahasan lebih rinci akan dilakukan dalam dua sesi kuliah berikutnya.</p>	<p>Devas, Financing Local Government in Indonesia (1989) Uppal, Taxation in Indonesia (1991)</p>
7.	<p><b>Perpajakan</b> Menguraikan penjelasan politis terhadap kebijakan penerimaan pemerintah dari pajak.</p>	<p>Manor, The Political Economy of Democratic Decentralisation (1999)</p>
8.	<p><b>Pendapatan non-pajak dan retribusi</b> Menguraikan penjelasan politis terhadap kebijakan penerimaan pemerintah dari sumber-sumber non-pajak, retribusi, pinjaman LN, dan sebagainya.</p>	<p>Mahi, Pendapatan Daerah dan Desentralisasi Fiskal (2001)</p>
9.	<p><b>Ujian Midterm</b></p>	
10.	<p><b>Manajemen belanja (expenditure assignments)</b> Membahas sisi pembelanjaan atau pengeluaran dari anggaran pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Pembahasan lebih rinci akan dilakukan dalam dua sesi kuliah berikutnya.</p>	<p>Simanjuntak, Pembiayaan Pembangunan Daerah (2001) Mardiasmo, Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah (2002)</p>
11.	<p><b>Sistem alokasi belanja: dana teknis departemen, DAU, DAK dan dana transfer ke daerah</b> Menguraikan tentang sistem alokasi anggaran kepada departemen, alokasi</p>	<p>Mahi &amp; Brojonegoro, Dana Alokasi Umum (2002) Kumorotomo, Konsep dan pola alokasi DAK (2010)</p>

	DAU kepada daerah, bagi hasil pusat-daerah, serta proporsi alokasi pajak untuk pemerintah daerah. Uraian terutama dikaitkan dengan hubungan antar lembaga pemerintah secara vertikal maupun horisontal.	
12.	<b>Pembiayaan Belanja</b> Mendiskusikan pembiayaan untuk belanja publik seperti manajemen utang, obligasi, hibah, dsb sebagai sumber pembiayaan untuk menutup defisit atau membuat komitmen belanja pemerintah. Pertimbangan ekonomi dan payung hukum dalam pembiayaan juga hendak dibahas secara rinci.	Hill, Intra-Country Regional Disparities (2000) Davey, Financing Local Development in Indonesia (1984)
13.	<b>Tata-kelola Anggaran dan Partisipasi Publik</b> Sebagai negara berkembang, Indonesia masih harus membenahi tata-kelola anggaran pemerintah. Pada saat yang sama, partisipasi publik yang masih rendah dalam penyusunan anggaran juga merupakan masalah yang akan dibahas dalam sesi ini.	OECD, Participatory Budgeting (2012) Wampler, Brian, Participatory Budgeting in Brazil, Pennsylvania State University Press, 2007
14.	<b>Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran</b> Membahas tentang sistem akuntabilitas keuangan dan anggaran di sektor publik, terutama kaitan antara lembaga-lembaga eksekutif dengan pemeriksa dan lembaga legislatif. Juga membahas tentang masalah transparansi anggaran publik di Indonesia.	Maravall, J.M. & Sanchez-Cuenca, I. (2008). <i>Controlling Governments: Voters, Institutions, and Accountability</i> . New York: Cambridge University Press. Ott, K. (2006). <i>Making Public Finance Public: Subnational Budget Watch in Croatia, Macedonia, and Ukraine</i> . Budapest: Open Society Institute.
15	<b>Refleksi: Evaluasi Sistem Penganggaran Publik di Indonesia</b> Mengajak mahasiswa untuk mengkritisi dan mengevaluasi sistem penganggaran yang masih berlaku di Indonesia, kelemahan dan keunggulannya serta perubahan kebijakan yang diperlukan supaya lebih baik, lebih responsif, transparan dan akuntabel.	Silabus, semua literatur.

## DAFTAR REFERENSI

1. Ahmad, Estisham and Russell Krelove, *Tax Assignments: Options for Indonesia*, World Bank paper, 1999
2. Anderson, James E., *Politics and the Economy*, Little, Brown and Company, Boston, 1966
3. Austin, Ian, *Pragmatism and Public Policy in East Asia: Origins, Adaptations and Developments*, Fairmont International, Singapore, 2001
4. Bahl, Roy and Johannes Linn, *Urban Public Finance in Developing Countries*, Oxford University Press, New York, 1992
5. Banfield, Edward C., *Political Influence*, The Free Press, New York, 1961
6. Blondal, J.R., Hawkesworth, I. & Choi H.D. (2009). "Budgeting in Indonesia", *OECD Journal on Public Budgeting*, Vol. 2009/2.
7. Bird, Richard M. & Francois Vaillancourt, *Fiscal Decentralization in Developing Countries*, Cambridge University Press, 1998
8. Breton, Albert, *An Introduction to Decentralisation Failure*, paper, Department of Economics, University of Toronto, 2000
9. Breul, J. D. & Moravits, C. eds.. *Integrating Performance and Budgets: The Budget Office of Tomorrow*. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2007
10. Buchanan, James M., *The Economics of Politics*, Institute of Economic Affairs, London, 1978
11. Carada, Wilfredo B., *Philippine Decentralization Experience: Briefing Notes for Decentralizing Polity*, seminar paper, 1999
12. Chandler, J.A., *Public Policy-Making for Local Government*, Croom Helm, London, 1988
13. Cochran, Charles L. & Eloise F. Malone, *Public Policy: Perspectives and Choices*, McGraw-Hill, Boston, 1999
14. Devas, Nick et al, *Financing Local Government in Indonesia*, Ohio Centre for International Studies, Ohio, 1989
15. Duncan, Jack W., *Organisational Behaviour*, Houghton Mifflin Company, Birmingham, 1981
16. Eaton, Kent, *Political and Obstacle to Decentralisation: Evidence from Argentina and the Philippines*, in *Development and Change*, Vol.32 No.1, Institute of Social Studies, January 2000
17. Ebel, Robert, *The Economics of Fiscal Decentralization*, World Bank paper, 2000
18. Hill, Hall, *Intra-Country Regional Disparities*, The Second Asian Development Forum, Singapore, 2000
19. Kelly, J.M. & Rivenbark, W.C. (2011). *Performance Budgeting for State and Local Government*. New York: M.E. Sharpe.
20. King, David (ed.), *Local Government Economics in Theory and Practice*, Routledge, London, 1992
21. Kitunzi, Anka, *Fiscal Decentralization in Developing Countries: An Overview*, World Bank paper, 2000
22. Kumorotomo, Wahyudi & Erwan Agus Purwanto (eds.), *Anggaran Berbasis Kinerja: Konsep dan Aplikasinya*, MAP-UGM, Jogjakarta, 2005
23. Kunarjo, *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*, UI-Press, Jakarta, 1996
24. Ladd Helen F., *The Challenge of Fiscal Disparities for State and Local Governments*, Edward Elgar Publishing Ltd., Cheltenham, 1999

25. MacAndrews, Colin (ed.), *Central Government and Local Government in Indonesia*, East Asian Social Science Monographs, Oxford University Press, Singapore, 1986
26. Majchrzak, Ann, *Methods for Policy Research*, Sage Publications, Beverly Hills, 1984
27. Manor, James, *The Political Economy of Democratic Decentralisation*, The World Bank, Washington, 1999
28. Maravall, J.M. & Sanchez-Cuenca, I. (2008). *Controlling Governments: Voters, Institutions, and Accountability*. New York: Cambridge University Press.
29. McDonald, Terrence and Sally K. Ward, *The Politics of Urban Fiscal Policy*, Social Science History Association, Sage Publication, California, 1984
30. McLure, Charles E. (ed.), *Tax Assignment in Federal Countries*, ANU Press, Canberra, 1983
31. Ott, K. (2006). *Making Public Finance Public: Subnational Budget Watch in Croatia, Macedonia, and Ukraine*. Budapest: Open Society Institute.
32. Peters, Guy B., *American Public Policy: Promise and Performance*, Chatham House Publishers, Inc., New Jersey, 1996
33. Prawiro, Radius, *Indonesia's Struggle for Economic Development: Pragmatism in Action*, Oxford University Press, Kuala Lumpur, 1998
34. Searle, R.J., *Decentralisation, Intergovernment Grants and Equalisation*, seminar paper, University of Indonesia, 2000
35. Rubin, I. *New Directions in Budget History*, SUNY Press, New York, 1988
36. Smoke, Paul, *Reforming Local Government in Developing Countries*, HIID Conference on Economic Policy Reform in Developing Countries, Morocco, 1988
37. Spahn, Paul Bernd, *Intergovernmental Relations, Macroeconomic Stability, and Economic Growth*, World Bank Institute, 1999
38. Subiyantoro, Heru and Singgih Riphath (eds.), *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2004
39. Tanzi, V., *Fiscal Federalism and decentralization: a Review of Some Efficiency and Macroeconomic Aspects*, in M. Bruno & B. Pleskovic (eds.), *Annual World Bank Conference on Development Economics*, Washington D.C., 1996
40. Tedjakusuma, Edi Effendi, *Analysis of the Impacts of Fiscal Decentralisation on Regional Development in Indonesia*, Unpublished PhD Thesis, Nagoya University, 2000
41. Uppal, J.S., *Taxation in Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1991
42. Urrutia, Miguel, Shinichi Ichimura & Setsuko Yukawa (eds.), *The Political Economy of Fiscal Policy*, UNU Press, Tokyo, 1989.
43. Wampler, Brian, *Participatory Budgeting in Brazil*, Pennsylvania State University Press, 2007

\*\*\*\*\*